

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DAN  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH (Studi  
Kasus pada DPPAD Provinsi Jawa  
Tengah)**

TRI MUSTIKA SARI

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Dian Nuswantoro

Jl.Nakula, No. 5-11 Semarang

**PENDAHULUAN**

Dalam suatu pemerintahan negara Indonesia yang terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi yang terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Dan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, tiap daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat yang berupa pajak. Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara juga seringkali digunakan sebagai instrumen kebijakan pemerintah.

Berdasarkan pemungutannya, pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah merupakan suatu sistem perpajakan di Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil kepada masyarakat (Achmad Lutfi, 2006). Terkait dengan Pajak Daerah, perannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah. Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan,

ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain – lain, harus ditetapkan dengan Undang – Undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebelumnya telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Terutama mengenai obyek dan tarif pajak, sehingga antara Pajak Nasional dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saling melengkapi.

Dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional yaitu demi masyarakat adil dan makmur, sehingga dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut. Dana tersebut diperoleh dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Sumber penerimaan dari dalam negeri salah satunya dari sektor

pajak yang merupakan peran serta langsung dari masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sektor pajak merupakan sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Program pembangunan nasional ikut meningkat dengan adanya penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ketahun yang semakin meningkat.

Didalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah Daerah diberi keleluasaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber peneriman daerah yang dimilikinya berdasarkan aspirasi dari masyarakat daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban dalam melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan pemerintahan yang lebih mandiri. Sehingga dengan ini pemerintah diharapkan dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri secara efektif dan efisien.

Pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber. Artinya pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
  - 1) hasil pajak daerah
  - 2) hasil retribusi daerah

- 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 4) lain-lain PAD yang sah
- b. Dana perimbangan.
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Jika ditelusuri lebih lanjut ketentuan Pasal 157 tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa di antara sumber pendapatan daerah tersebut, hanya "Pendapatan Asli Daerah" yang merupakan sumber pembiayaan sebagai indikasi sumber pendapatan daerah yang otonom. Sebab sumber pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan merupakan hasil penerimaan yang didasarkan persentase perimbangan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Dan pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Pajak Daerah Provinsi terdiri dari Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Daerah Kabupaten/Kota yaitu Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Parkir.

Dari pajak daerah diatas , penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah adalah jenis pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dan didalam proses pencatatan

dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran STNK, pembayaran Pajak, BBNKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Kemudian dalam mewujudkan tercapainya kesatuan ekonomi dalam rangka wawasan nusantara, maka pengaturan pajak kendaraan bermotor oleh daerah dilaksanakan dalam pola keterpaduan dan keseragaman secara nasional.

Penelitian tentang kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahadianingtyas Adi Tomo (2012) tentang Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang mengambil obyek penelitian di UP3ad dan Samsat Surakarta. Dengan menggunakan variabel pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah diuji dengan menggunakan metode observasi yang hasilnya besarnya persentase dari kontribusi pajak progresif belum dapat dihitung sehingga perhitungan masih menggunakan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan. Besarnya persentase dari kontribusi tersebut, baik roda 4 maupun roda 2 tidak Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah yang mengambil obyek penelitian di DPPAD Provinsi Jawa Tengah. Dengan menggunakan variabel pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah diuji dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang hasilnya kontribusi pajak kendaraan bermotor yang paling besar pada tahun 2008. Sedangkan Penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah menganalisis kontribusi pajak kendaraan

bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan variabel independennya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan menunjukkan hasil bahwa variabel pendapatan asli daerah akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Dan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Mengingat besarnya peran pajak daerah sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga membuatnya menjadi bagian yang sangat vital. Dan dari jenis – jenis Pajak Daerah, penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah adalah jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Oleh karena itu penulis bermaksud untuk meneliti sampai sejauh mana penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah. Dan bermaksud menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH” (Studi Kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah).**

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba menguraikan beberapa permasalahan yang akan diangkat sebagai berikut :

- 1) Menganalisis seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2009 - 2012 ?
- 2) Menganalisis seberapa tingkat efektivitas realisasi dari pendapatan asli daerah, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2009 – 2012 ?
- 3) Menganalisis penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2009-2012 dengan analisis SWOT ?
- 4) Bagaimana upaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor agar tetap memenuhi target ?

## **LANDASAN TEORI**

### **Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999), sumber – sumber penerimaan daerah meliputi : pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber

pendapatan daerah yang diatur dalam pasal 79 Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 79 Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang didapat dengan uang karena kewenangan yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Adapun sumber – sumber pendapatan asli daerah menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 meliputi :

- 1) Hasil Pajak Daerah yaitu Pungutan daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum.
- 2) Hasil Retribusi Daerah yaitu Pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian karena memperoleh jasa milik pemerintah daerah yang bersangkutan.
- 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah.
- 4) Lain – lain pendapatan daerah yang sah yaitu pendapatan – pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis – jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas.

Sumber – sumber pendapatan asli daerah harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor Undang – undang yang berlaku. Dalam rangka menggali sumber-sumber keuangan daerah terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, maka pemerintah daerah harus berusaha mencari sumber-

sumber keuangan yang potensial yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.

### **Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Objek pajak adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor termasuk kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor yang berada di daerah lebih dari 90 hari berturut-turut. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Dikecualikan dari objek pajak adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh:

1. Pemerintah.
2. Kedutaan, konsulat perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara.
3. Kepemilikan/penguasaan kendaraan bermotor yang berada di daerah kurang dari 90 hari terhitung sejak tiba.

4. Kepemilikan/penguasaan kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk melayani orang sakit, orang mati dan pemadam kebakaran tanpa dipungut pembayaran.

Dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok:

1. Nilai jual kendaraan bermotor
2. Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Besarnya tarif PKB ditetapkan sebesar

:

1. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
2. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum
3. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat/besar

Sedangkan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor.

Dasar Hukum:

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Objek dan Subjek.

Objek BBNKB adalah penyerahan hak milik dan/atau penguasaan kendaraan

bermotor akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak, memasukkan dari luar negeri untuk dipakai, keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, memasukkan ke badan usaha, dan penguasaan kendaraan bermotor lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- a. Subjek BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- b. Azas pungutan BBNKB dipungut berdasarkan azas domisili (tempat tinggal subjek BBNKB).

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada keputusan Menteri Dalam Negeri.

Tarif BBNKB atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum dan tidak umum.
- b. 3% (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat berat/besar.

Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar:

- a. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum dan tidak umum.
- b. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat berat/besar.

Tarif BBNKB atas penyerahan warisan ditetapkan sebesar:

- a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum dan tidak umum.
- b. 0,03% (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat berat/besar.

Besarnya BBN-KB dapat dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. BBN-KB I dikenakan

juga bagi kendaraan bermotor yang belum pernah BBN di Indonesia (kendaraan bekas Jepang, kendaraan dump dari Pemda dan TNI).

## **JENIS DAN SUMBER DATA**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Contohnya : Data yang diperoleh sebagai hasil wawancara yang merupakan tanya jawab langsung dengan pegawai yang ada di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Tengah.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang telah diolah dan telah menjadi dokumentasi diperusahaan. Contohnya : Profil kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

## **Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian sebagai berikut :

- a) Metode dokumentasi yaitu untuk memperoleh sejumlah data melalui pencatatan dari sejumlah dokumen (arsip) yang berhubungan dengan PKB, BBNKB dan PAD.
- b) Metode wawancara yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai yang ada di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## METODE PENELITIAN

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif yaitu :

### 1) Metode kuantitatif

Metode kuantitatif yaitu analisis dalam bentuk perhitungan angka-angka berdasarkan data yang terkumpul dengan menggunakan rumus kontribusi dan efektivitas.

#### a) Kontribusi

Kontribusi PKB BBNKB digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan PKB BBNKB dalam meningkatkan pendapatan daerah, sehingga akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tindakan/kebijakan apa saja yang harus diperhatikan PKB BBNKB sebagai usaha peningkatan terhadap PAD.

Semakin besar kontribusi PKB BBNKB terhadap PAD semakin besar pula peranan PKB BBNKB terhadap PAD dan sebaliknya.

#### b) Efektivitas

Efektifitas merupakan hubungan antara realisasi penerimaan dari instrumen PAD terhadap target penerimaan dari instrumen PAD yang digunakan untuk menghitung besarnya penerimaan dari komponen PAD sesuai dengan target yang ada (Devas,1989:146).

### 2) Metode Kualitatif

Yaitu suatu metode analisis dalam bentuk bukan angka tetapi hanya merupakan uraian keterangan, usulan pendapat serta kesimpulan-kesimpulan.

Dan penelitian ini juga menggunakan Analisis SWOT seperti yang ditegaskan Hunger dan Wheelen, “The factor are most importance to the corporation’s future are refered to as strategic factors adsummarized with acronym SWOT standing for Strenght, Weakness, Opportunities and Threats (Hunger dan Wheelen,1993:12) yang terdiri dari :

- a) *Strenght* (Keunggulan)
- b) *Weakness* (Kelemahan)
- c) *Opportunities* (Peluang)
- d) *Threats* (Ancaman)

## PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian secara deskriptif untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas PKB BBNKB terhadap pendapatan asli daerah dan untuk mengetahui serta melakukan pembenahan dalam pemungutan PKB BBNKB agar lebih baik serta mengetahui upaya – upaya DPPAD Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari PKB BBNKB.

Berdasarkan hasil analisis data secara kuantitatif dan kualitatif maka dapat

disimpulkan bahwa PKB BBNKB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan pencapaian realisasi dari PKB BBNKB pada tahun anggaran 2009-2012 selalu melebihi target serta kontribusi PKB BBNKB terhadap pendapatan asli daerah cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa PKB BBNKB memiliki kontribusi positif dan efektif terhadap pendapatan asli daerah. Secara lebih jelas dijelaskan sebagai berikut :

### **Kontribusi dan Efektivitas PKB terhadap PAD**

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan kontribusi PKB yang penerimaan realisasinya untuk tahun anggaran 2009-2012 selalu melebihi target dari yang dianggarkan. Dan kontribusi PKB terhadap pendapatan asli daerah dengan rata-rata 34,8% yang merupakan jumlah persentase yang besar. Padahal masih banyak sumber-sumber penerimaan pendapatan yang lainnya. Oleh sebab itu kontribusi PKB akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Serta untuk tingkat efektivitasnya sendiri rata-rata 109,3% yang berarti sangat efektif. Dalam penelitian ini kontribusi PKB memiliki kontribusi positif dan sangat efektif terhadap pendapatan asli daerah.

### **Kontribusi dan Efektivitas BBNKB terhadap PAD**

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan kontribusi BBNKB yang penerimaan realisasinya untuk tahun anggaran 2009-2012 selalu melebihi target dari yang dianggarkan. Dan kontribusi BBNKB terhadap pendapatan asli daerah dengan rata-rata 36,6% yang merupakan jumlah persentase yang besar. Padahal masih banyak sumber-sumber penerimaan pendapatan yang lainnya. Oleh sebab itu

kontribusi BBNKB juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Serta untuk tingkat efektivitasnya rata-rata 119,6%. Dalam penelitian ini kontribusi BBNKB memiliki kontribusi positif dan sangat efektif terhadap pendapatan asli daerah.

### **Hasil analisis SWOT dari PKB BBNKB di Provinsi Jawa Tengah**

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa PKB BBNKB merupakan penyumbang terbesar untuk pendapatan asli daerah sehingga PKB BBNKB merupakan sumber penerimaan yang sangat menonjol dalam meningkatkan penerimaan daerah. Dengan adanya jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat di Jawa Tengah semakin membuka peluang untuk meningkatkan penerimaan PKB BBNKB. Hal ini tentu berdampak positif bagi penerimaan pendapatan asli daerah.

Tetapi dibalik besarnya penerimaan yang didapat dari PKB BBNKB juga terdapat banyak hambatan yaitu sering terjadinya pergantian kepemilikan kendaraan bermotor tanpa diikuti langsung pengatasmamaan kepemilikan kedalam namanya sendiri serta adanya biro-biro jasa individual seperti calo mengakibatkan adanya kolusi terhadap oknum pegawai terhadap berbagai biro hal ini juga dapat mengurangi penerimaan PKB BBNKB.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan , maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari jenis penerimaan PAD nya, pos pajak daerah merupakan pos yang memberikan kontribusi yang paling besar bagi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) , khususnya pada PKB dan BBNKB.

- a) Dari hasil analisis kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD di provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2009-2012. Kontribusi PKB yaitu berkisar antara 33,9% - 35,9% dengan rata-rata 34,8%. Kontribusi terbesar diberikan pada tahun 2009 sebesar 35,9% dan terendah diberikan pada tahun 2012. Sedangkan kontribusi BBNKB berkisar antara 30,6% - 42,7% dengan rata-rata sebesar 36,6% . Kontribusi terbesar diberikan pada tahun 2012 sebesar 42,7% dan terendah diberikan pada tahun 2009 sebesar 30,6%.
- b) Dari hasil analisis data perhitungan tingkat efektivitas PAD, PKB dan BBNKB di provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun dapat dilihat bahwa PAD yang paling tinggi tingkat efektivitasnya tahun 2010 sebesar 113,3% dan tingkat yang paling rendah tahun 2012 sebesar 96,1% berarti dapat dikategorikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah efektif. Kemudian untuk perhitungan PKB yang paling tinggi tingkat efektivitasnya tahun 2010 sebesar 118,3% dan tingkat yang paling rendah tahun 2012 sebesar 105,7% berarti dapat dikategorikan penerimaan PKB sangat efektif. Sedangkan untuk perhitungan BBNKB yang paling tinggi tingkat

efektivitasnya tahun 2010 sebesar 145,2% dan tingkat yang paling rendah tahun 2011 sebesar 109,5% berarti dapat dikategorikan penerimaan BBNKB sangat efektif.

- 1) Dari hasil analisis SWOT mekanisme pemungutan PKB dan BBNKB Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki keunggulan dan peluang serta kelemahan ancaman.
  - a) Keunggulannya yaitu merupakan sumber penerimaan yang menonjol dalam meningkatkan penerimaan daerah, pemungutannya dilakukan pada setiap kabupaten sehingga mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak dan adanya pembagian tugas kerja yang jelas dan terstruktur.
  - b) Kelemahannya yaitu kendaraan bermotor merupakan barang bergerak yang kepemilikannya dapat berpindah tangan secara cepat sehingga sangat berpengaruh terhadap upaya penagihannya serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya.
  - c) Peluangnya yaitu dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka peluang meningkatkan penerimaan

PKB dan BBNKB sangat besar secara ekonomis.

- a) Ancamannya yaitu sering terjadi pergantian kepemilikan kendaraan bermotor tanpa diikuti langsung proses mengatasmakan kepemilikan kedalam namanya sendiri dan Adanya biro-biro jasa yang mengakibatkan kolusi antara oknum pegawai dengan berbagai biro seperti calo.

### **Saran**

Dari kesimpulan tersebut di atas maka penulis memberikan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah:

- 1) Meskipun mengalami kenaikan dan penurunan pada tiap tahunnya tetapi tingkat kontribusi dan efektivitas yang telah dicapai sudah dikategorikan sangat efektif karena tingkat pencapaiannya diatas 100%, pihak DPPAD Provinsi Jawa Tengah harus bisa mempertahankan tingkat efektivitas tersebut.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan pembinaan teknis kepada aparat pemungut pendapatan daerah yang tercermin dalam peningkatan pelayanan, disiplin kerja, kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dengan melakukan workshop, studi banding, diklat, pelatihan sistem pengelolaan keuangan SKPD, dan pelatihan jabatan fungsional komputer yang diselenggarakan oleh lembaga daerah.

### **Keterbatasan**

Dalam penelitian ini masih dapat keterbatasan diantaranya adalah :

1. Rentang waktu dalam penelitian ini relatif singkat yaitu selama 4 tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sehingga data yang diperoleh sedikit.
2. Penelitian ini hanya memberikan gambaran secara umum tentang kontribusi dan efektivitas PKB dan BBNKB terhadap PAD, dan tidak memberikan penjelasan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadi kenaikan dan penurunan nilai data-data yang ada. Karena pengambilan data dibatasi oleh pihak DPPAD Provinsi Jawa Tengah.
3. Tidak adanya ketentuan yang jelas untuk menentukan target penerimaan PKB dan BBNKB. Selama ini penentuan target hanya berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak PKB dan BBNKB.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi Tomo, Rahadianingtyas. 2012, *“Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”*. Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Solo.
- DPPAD Prov Jateng; *Profil DPPAD Provinsi Jawa Tengah*; Semarang; Kantor Pusat DPPAD Prov Jateng; 2012.
- DPPAD Prov Jateng; *Rekapitulasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah*; Semarang; Kantor Pusat DPPAD Prov Jateng; 2012.
- DPPAD Prov Jateng; *Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah*; Semarang;

- Kantor Pusat DPPAD Prov Jateng; 2012.
- DPPAD Prov Jateng; *Informasi Ringkas Penerimaan dari Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah*; Semarang; Kantor Pusat DPPAD Prov Jateng.
- Ersandy, Novita. 2010. “*Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah*”. Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro.
- Herwandi. 2008. “*Peranan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur*”. Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 1999. “*Metodologi Penelitian Bisnis*”. Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010, *Tentang Perhitungan Dasar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 3.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010, *Tentang Perhitungan Dasar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, *Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1994, *Tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Lutfi, Achmad. 2006. *Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan PAD*.
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. *Tentang Struktur Organisasi DPPAD Provinsi Jawa Tengah*.
- Sugiyono, 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kesembilan, CV Alfabeta, Bandung.
- Suwandy, Erly. 2002, *Pajak Daerah, Salemba Empat*, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, *Tentang Komponen Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, *Tentang Pajak Daerah*.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999  
Pasal 2 ayat 1 dan 2, *Tentang Pajak Daerah*.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999  
Pasal 3 ayat 1, *Tentang Tarif Pajak  
Daerah*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  
Pasal 79, *Tentang Pemerintahan  
Daerah*.

Wijaya HAW,2002, Penyelenggaraan  
Otonomi di Indonesia. Raja Grafindo  
Persada, Jakarta.BPFE Yogyakarta.

Yani, Ahmad. 2002, *Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama,  
Yogyakarta.

Yunanto, Setyono. 2008. “*Upaya Kantor  
Bersama SAMSAT Dalam  
Meningkatkan Pendapatan Asli  
Daerah dari Pajak Kendaraan  
Bermotor*”. Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas Brawijaya.

Yunus, Abdul Thalib. 2010. Analisis  
Kontribusi Pajak Kendaraan  
Bermotor Terhadap Pendapatan Asli  
Daerah Pada Kabupaten Bone  
Bolango Di Provinsi Gorontalo.  
Jurnal Economic  
Resources,ISSN.0852-1158, Vol.11  
No.30, Februari 2010.